

**KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA:
KASUS DI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN – DI
YOGYAKARTA**

***COMMUNITY PREPAREDNESS IN DISASTER MANAGEMENT: CASE STUDY IN
CANGKRINGAN, SLEMAN DISTRICT – DI YOGYAKARTA***

Gunawan

Puslitbangkesos, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang Jakarta Timur
E-mail: gun_prawiro@yahoo.co.id

Diterima: 8 Juli 2014; Direvisi: 4 Agustus 2014; Disetujui terbit: 30 Agustus 2014

Abstract

Community preparedness in Disaster management is a case study in the southern slopes of Mount Merapi, Cangkringan, Sleman District. This study aims to answer the question: 1) how to build a Community response preparedness; 2) how the existence of the Community preparedness. Data and information gathered from multiple sources with techniques: a) study the documentation; b) in-depth interviews; c) observation; and d) Focused Group Discussions (FGD). From a qualitative descriptive analysis be revealed that people on the slopes of the volcano, generally have a problem-solving method (coping strategy) and the value of the underlying behavior of people in touch with nature. Society and government have united to achieve human welfare. Cangkringan Action is evidence of; 1) the seriousness of the state in Disaster Risk Reduction; 2) consistency and accountability of the Republic of Indonesia for the ASEAN agreement, the Asian nations and peoples of the world in Disaster Risk Reduction Cangkringan Community preparedness model can be replicated in other locations that have a high enough level of vulnerability. However, within the Framework of the model replication, allocation of time and energy of the Community need to be considered. Mountainside communities generally do not have a fixed income, so they need to be compensated for the time and effort that should be productive for themselves and their families to participate in various programs taken up.

Keywords: *community, preparedness, management, disaster.*

Abstrak

Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan penelitian kasus di lereng gunung Merapi bagian selatan di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan: 1) bagaimana respon masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan; 2) bagaimana eksistensi kesiapsiagaan masyarakat. Data dan informasi dihimpun dari beberapa sumber dengan teknik; a) studi dokumentasi; b) wawancara mendalam; c) observasi; dan d) diskusi kelompok terarah. Dari analisis deskriptif kualitatif terungkap bahwa masyarakat di lereng gunung berapi, umumnya mempunyai metode pemecahan masalah (*coping strategy*) dan nilai yang mendasari perilaku masyarakat berhubungan dengan alam. Masyarakat dan pemerintah telah bersatu untuk mencapai kemaslahatan manusia. Aksi Cangkringan merupakan bukti; 1) keseriusan negara dalam pengurangan risiko bencana; 2) konsistensi dan pertanggungjawaban Negara Republik Indonesia atas kesepakatan ASEAN, Asian dan bangsa bangsa dunia dalam pengurangan resiko bencana. Model kesiapsiagaan masyarakat di Cangkringan dapat direplikasi di lokasi lain yang mempunyai tingkat kerawanan cukup tinggi. Namun dalam kerangka replikasi model tersebut, alokasi waktu dan tenaga dari masyarakat perlu dijadikan bahan pertimbangan. Masyarakat lereng gunung umumnya tidak mempunyai pendapatan tetap, sehingga mereka perlu kompensasi atas waktu dan tenaga yang seharusnya produktif untuk diri dan keluarganya tersita untuk mengikuti berbagai program.

Kata Kunci: *kesiapsiagaan, masyarakat, penanggulangan bencana.*

PENDAHULUAN

Sudut pandang geologi, Indonesia terletak di suatu wilayah dinamis. Dinamika gerak alam ini tercermin dari frekuensi terjadinya letusan gunung berapi, gempa bumi, gempa bumi dan tsunami, tanah longsor/tanah ambles dan banjir. Selama satu dekade pasca Gempa bumi dan Tsunami tanggal 26 Desember 2004, gerak alam tersebut seolah tiada henti. Beberapa catatan peristiwa penting yang terkait dengan gerak alam dimaksud antara lain: 1) Gempa bumi: Nias, Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006), Padang – Sumatera barat (2009), Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai (2010); Aceh Tengah dan Bener Meriah (2013); 2) Letusan gunung berapi: Gunung Merapi yang terletak di perbatasan antara DIY dan Jawa Tengah (2010), Gunung Kelud di Jawa Timur dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara (2014).

Gerak alam yang sangat cepat dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Sebagai ilustrasi, semburan awan panas dan material yang terlontar ketika terjadi erupsi Merapi tanggal 26 Oktober 2010. Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memperkirakan 867 hektare hutan di kawasan Gunung Merapi di wilayah Kabupaten Sleman rusak akibat erupsi gunung itu, dan hutan seluas itu terdiri atas hutan negara di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), hutan rakyat, serta kebun rakyat, menurut Sekretaris Dinas Kehutanan DIY Kardina, di Yogyakarta. Di kawasan TNGM Cangkringan mengalami kerusakan seluas 310 hektare dengan kerugian sekitar Rp17 miliar (Antarnews.com, 2010). Letusan Merapi tersebut juga telah menimbulkan bencana bagi umat manusia, baik yang tinggal di wilayah sekitarnya maupun yang tinggal di luar wilayah tersebut.

Bagi masyarakat lereng Merapi, antara ancaman dan sumber kehidupan ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi Gunung Merapi merupakan salah satu gunung paling aktif di Indonesia dan periodisitas letusannya relatif

pendek yaitu 3-7 tahun. Luapan lahar dan material, dan luapan air sungai yang bersumber dari lereng Merapi merupakan fenomena ancaman bagi umat manusia yang tinggal di sekitarnya. Sebagai ilustrasi erupsi Merapi tahun 2010 telah berdampak pada 237 korban meninggal. Pada tahun 2014, catatan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta, dari 20 hingga 29 April 2014, di Merapi telah terjadi gempa guguran 37 kali, gempa multi phase 13 kali, hembusan empat kali, gempa tektonik 24 kali, dan gempa *low frequency* (LF) 29 kali. Peningkatan signifikan terjadi pada gempa LF sebagai indikasi meningkatnya fluida gas vulkanik yang berpotensi menimbulkan letusan. Mulai 29 April 2014 pukul 23.50 WIB BPPTKG Yogyakarta meningkatkan status Merapi dari normal menjadi waspada (Solopos.com, 2014).

Di sisi lain keberadaan gunung Merapi mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitarnya. Kesuburan tanah dan keindahan alam Merapi berpotensi besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik masyarakat, baik bagi masyarakat lereng Merapi maupun masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Sebulan pasca erupsi, lereng Merapi bak hamparan lautan pasir. Namun, kurang dari tiga tahun lokasi tersebut telah berubah bak hutan yang lebat. Merapi dan sekitarnya merupakan wilayah yang potensial untuk perkembangan pariwisata dan pertanian. Banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian dan dunia wisata merupakan manifestasi dari ketergantungan masyarakat terhadap Merapi.

Uraian di atas dapat dikonotasikan bahwa antara ancaman dan sumber kehidupan telah menyatu dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat (*living harmony with risk disaster*). Oleh karena itu, persoalan yang menarik adalah bagaimana mengurangi atau meminimalisasi risiko bencana yang disebabkan oleh gerak

alam Merapi. Pengalaman yang menarik untuk dijadikan sebagai pelajaran dari setiap kali terjadi bencana adalah besarnya risiko baik bagi masyarakat korban maupun dalam pelayanannya.

Dalam kerangka penanggulangan bencana alam, dana, tenaga, dan waktu yang telah dialokasikan untuk penanganan terhadap korban bencana sangat besar. Namun, setiap kali terjadi bencana alam selalu berisiko:

1. Tercerai berainya keluarga selama proses penyelamatan diri sehingga tidak sempat membawa surat atau dokumen penting, sebagai kelengkapan untuk memperoleh perlindungan hukum dan dapat berdampak pada perencanaan keluarga berantakan karena ketidakpastian kapan masa pengungsian berakhir. Hilangnya harta benda, pekerjaan, dan ketelantaran pendidikan anak semakin mempersulit proses pemulihan kehidupan keluarga.
2. Jumlah korban bencana alam cukup besar, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda yang sangat besar, sehingga setiap bencana selalu diikuti dengan bertambah besarnya permasalahan sosial dan semakin kompleks, sementara itu permasalahan sosial yang ada masih belum tertangani. Angka kemiskinan dan ketelantaran menjadi semakin besar.
3. Pelayanan yang diberikan (baik oleh pemerintah maupun masyarakat) lebih terkonsentrasi pada pelayanan darurat (*emergency response*) dan setiap pengungsian selalu terjadi masalah kekurangan/tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih, toilet dan sanitasi yang berdampak pada meningkatnya penyakit diare akut dan infeksi saluran pernafasan yang melanda pengungsi di lokasi penampungan.
4. Bencana alam yang terjadi (sejak bencana tsunami 2004 dan beberapa bencana di daerah lain hingga akhir tahun 2006) masih menyisakan masalah sosial yang cukup besar. Jika permasalahan

tersebut masih berlarut dan tidak segera mendapatkan pelayanan dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan sosial baru yang lebih besar dan lebih kompleks (Gunawan, dkk., 2009).

Sesuai manajemen bencana yang komprehensif, pengurangan resiko bencana telah dijadikan sebagai isu krusial dan lebih menitikberatkan pada fase pra bencana, yakni membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kondisi ini tercermin dari agenda dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action/HFA*), bahwa tahun 2005 – 2015 telah dijadikan sebagai Dekade Membangun Ketahanan Bangsa dan Masyarakat terhadap Bencana. HFA tersebut telah ditandatangani oleh 168 negara termasuk Indonesia.

Indonesia telah menindaklanjuti dengan pengesahan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. undang undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Unsur yang terkait dalam Penanggulangan Bencana terdiri Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang pelaksanaannya didukung lembaga sektoral, masyarakat dan lembaga usaha.

Konsepsi tentang Kesiapsiagaan masyarakat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Bab I pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Klausul ini mengisyaratkan perlunya perencanaan suatu kegiatan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Konteks penanggulangan bencana termasuk di dalamnya adalah fasilitas dan aksesibilitas dalam penanggulangan bencana. Manajemen bencana, Kusumasari (2014, h.25-

26) mengemukakan: kemampuan kesiapsiagaan yang kuat merupakan permasalahan awal. Kemampuan ini dapat dibangun dengan perencanaan, pelatihan, dan latihan. Ada banyak fase yang harus dilakukan pada tahap kesiapsiagaan, termasuk membentuk manajemen darurat, membuat rencana darurat, mengembangkan sistem peringatan dini, mengidentifikasi sumber daya dan bantuan, serta membuat kesepakatan untuk saling membantu dan mendidik masyarakat.

Interpretasinya adalah kesiapsiagaan ini harus dimanifestasikan pada setiap tahapan dalam manajemen penanggulangan bencana. Dalam konteks ini adalah Siap Siaga pada kondisi normal (Pra Bencana), saat terjadi bencana (Penyelamatan), Tanggap Darurat, dan siap siaga dalam tindakan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Kesiapsiagaan seperti ini tentunya akan memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko pada dalam penyelamatan, pengungsian, dan penyaluran bantuan. Dalam arti yang lebih luas, kesiapsiagaan dapat pula dimaknai sebagai kondisi yang hendak dicapai. Artinya, Kondisi (kesiapsiagaan masyarakat) tersebut dapat diukur. Dalam konteks ini yang diukur adalah 1) kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) kunci yang berperan dalam kesiapsiagaan tersebut (baik secara individu maupun kelembagaan); 2) sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kesiapsiagaan tersebut; 3) upaya untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang yang terlibat; 4) legitimasi SDM kunci yang berperan dalam kesiapsiagaan baik di lembaga pemerintah dan non pemerintah maupun di lingkungan masyarakat; dan 5) jejaring sosial yang dimiliki.

Pencapaian kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dalam pasal 5 disebutkan Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sedangkan peran masyarakat yang diatur pada Pasal 26 ayat 1)

huruf e. setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan Pasal 27 huruf b. setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Meskipun dalam peraturan perundangan tidak disebutkan batasan tentang masyarakat, namun kata setiap orang dalam pengertian yang lebih luas dapat dikonotasikan sebagai masyarakat. Interpretasinya adalah aktor utama yang berperan untuk kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana adalah pemerintah bersama masyarakat.

Baik pemerintah maupun pemerintah daerah sudah ada kejelasan tentang kebijakan, program, sumber anggaran, dan personel serta fasilitas yang diperlukan. Hal ini tercermin dari pelatihan sumber daya manusia baik yang diselenggarakan oleh BNPB maupun lembaga sektoral dan dukungan fasilitas penunjang kegiatannya. Di tingkat masyarakat, pada umumnya telah banyak mempunyai pengalaman dalam menghadapi bencana. Akumulasi pengetahuan warga yang semakin hari semakin tinggi tentang bencana dengan segala resikonya, maka kemampuan warga dalam mengatasi hambatan yang terjadi juga akan semakin baik, karena pada dasarnya manusia selalu belajar dari pengalaman masa lalu (Marendra, G, 2014). Sebagai ilustrasi, SMONG bagi masyarakat Simeulue. SMONG merupakan salah satu manifestasi kearifan lokal yang dikonstruksi secara turun temurun. Salah satu manfaat terbesar dari kearifan lokal tersebut antara lain terhindarnya masyarakat Simeulue dari tsunami pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Bahkan Kearifan lokal dari Simeulue ini memang telah menjadi kajian internasional Sasakawa Award dari *International Strategy for Disaster Reduction*.

Masyarakat yang berada di lokasi rawan bencana umumnya telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi bencana.

namun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat variatif. Pada masyarakat yang relatif siap, akan semakin kecil risikonya, penanganan tanggap darurat akan lebih terorganisasi dan pemulihan (*recovery*) biasanya akan lebih Cepat dari masyarakat yang tidak siap (Gunawan, dkk, 2009). Oleh karena itu persoalan yang akan diangkat dalam naskah ini adalah bagaimana respon masyarakat di lokasi rawan bencana lereng Merapi dalam membangun kesiapsiagaan.

Akurasi dari jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya diperlukan data dan informasi yang dihimpun dari beberapa sumber informasi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan teknik: 1) studi dokumentasi, 2) wawancara mendalam, 3) observasi, dan 4) diskusi kelompok terfokus (*Focused Group Discussion/FGD*). Data yang terhimpun melalui penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif. Dalam kerangka analisis ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Lokus penelitian ini adalah Kabupaten Sleman khususnya Kecamatan Cangkringan. Wilayah yang berada di lereng Merapi ini berpotensi bencana cukup besar.

PEMBAHASAN

Keberadaan Masyarakat di Lereng Merapi

Merapi terletak di empat wilayah administratif yakni Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Magelang di Provinsi Jawa Tengah. Cangkringan merupakan salah satu wilayah kecamatan Sleman yang terdekat dengan puncak Merapi (tepatnya di desa Umbulharjo Dusun Kinahrejo. Secara administratif, Kecamatan Cangkringan dibagi menjadi lima wilayah perdesaan, yakni; Desa Umbulharjo, Desa Wukirsari Desa Kepuharjo, Desa Glagaharjo, dan Desa Argomulyo. Tepatnya di Desa Umbulharjo

Dusun Kinahrejo.

Kecamatan Cangkringan berada di sebelah timur laut dari Ibukota Kabupaten Sleman. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Sleman adalah 25 Km atau berada + 25 di sebelah utara Pusat Pemerintahan Provinsi D.I Yogyakarta. Kecamatan Cangkringan merupakan wilayah terdekat dengan puncak Merapi yang semakin dikenal masyarakat dunia ketika terjadi erupsi Merapi pada tahun 2010.

Beberapa wilayah Cangkringan telah dikategorikan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung Merapi. Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 tahun 2011 Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami BAB I Huruf F angka 7 KRB Gunung api adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi gunung api baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa wilayah Kecamatan Cangkringan telah ditetapkan sebagai wilayah terlarang untuk hunian dengan status potensi KRB III. Lampiran I Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami disebutkan:

1. Kawasan Rawan Bencana I, yang untuk selanjutnya disingkat dengan KRB I, merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu, dan/atau air dengan keasaman tinggi. Apabila letusan membesar, kawasan ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat, serta lontaran batu pijar;
2. Kawasan Rawan Bencana II, yang untuk selanjutnya disingkat dengan KRB II, merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat,

hujan lumpur panas, aliran lahar, dan/atau gas beracun; dan

3. Kawasan Rawan Bencana III, yang untuk selanjutnya disingkat dengan KRB III, merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan/atau gas beracun.

Ketika erupsi Merapi terjadi pada tahun 2010, wilayah yang ditetapkan sebagai KRB sampai pada jarak 10 kilometer dari kota Yogyakarta. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh wilayah Cangkringan merupakan wilayah bahaya dan seluruh penduduk harus diungsikan. Sebagai ilustrasi, dahsyatnya erupsi Merapi ini dapat dilihat dari harta benda yang tertinggal di rumah Kuncen Merapi yang lebih dikenal dengan mbah Marijan dan sekitarnya yang telah terbakar awan panas. Uraian ini menunjukkan bahwa Lereng Merapi Cangkringan berpotensi bencana atau ancaman dan berisiko tinggi bagi kehidupan.

Dibalik ancaman di atas, gunung Merapi menyimpan potensi besar bagi peningkatan kehidupan dan penghidupan manusia. Keberadaan gunung Merapi mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitarnya. Pesona alam Merapi, kesuburan tanah di sekitarnya dan budaya telah memberikan kontribusi besar kesejahteraan, baik bagi masyarakat lereng Merapi maupun masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Merapi telah dijadikan sebagai salah satu objek wisata yakni Wisata Lava atau Lava Tour. Banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian dan dunia wisata merupakan manifestasi dari ketergantungan masyarakat terhadap Merapi.

Masyarakat lereng Merapi adalah masyarakat yang hidup di antara ancaman dan sumber kehidupan (*living harmony with risk disaster*). Masyarakat agraris umumnya yang masih kental dengan pola pikir sosio – magis ada tata nilai (kearifan) yang mengatur

perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan (makna hidup harmoni). Kearifan ini juga telah dijadikan pandangan masyarakat Yogyakarta dan Jawa pada umumnya. Keeratan hubungan (interaksi) antara masyarakat lereng Merapi dengan lingkungan alam ini tercermin dari filosofi *Bopo Angkoso – Ibu Pertiwi*. Filosofi ini dijadikan sebagai konsep dasar dalam pencapaian kehidupan harmoni antara alam dengan manusia. Perilaku dalam menjaga hubungan dengan langit (*bopo angkoso*) dan bumi (ibu pertiwi) bak penghormatan terhadap orang tua (ayah dan ibu) yang selalu memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi anak-anaknya, sehingga karakter alam harus dipahami bak memahami karakter *bopo angkoso* (langit) dan ibu pertiwi. Masyarakat mempunyai keyakinan hubungan spiritual dan supranatural antara Merapi, Kraton Yogyakarta dan Laut Selatan yang didasari atas anggapan Merapi bukan ancaman tapi sebagai sumber kehidupan. Fenomena perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan alam juga dapat dilihat dari ritual selamatan di Labuhan Merapi secara rutin diselenggarakan gunung Merapi.

Dalam menghadapi ancaman Merapi, manifestasi perilaku masyarakat di lereng Merapi ini tercermin dari sikap penuh hormat meskipun sedang terjadi erupsi. Sebagai ilustrasi, ungkapan tokoh masyarakat yang tidak menyebut Merapi ”meletus”, melainkan ”*Eyang lagi Merapi ewuh, ojo cedhak-cedhak, lan ojo ngrusuhi*”. Secara harfiah dapat diterjemahkan: Merapi sedang punya kerja, jangan mendekat, dan jangan mengganggu. Dalam manajemen bencana, kalimat ini bermakna sebagai peringatan (*warning*) kepada masyarakat untuk menjauhi Merapi yang sedang bergejolak meninggalkan permukiman dan masyarakat dianjurkan/diperingatkan agar tidak beraktivitas (sosial-ekonomi) di sekitar Merapi.

Masyarakat memperoleh pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan

alam dari para leluhur yang titen terhadap fenomena alam. Hasil dari perilaku titen ini telah mengajarkan arti hidup dan nilai kehidupan bagi masyarakat di sekitar Merapi serta bagaimana bertindak terhadap perilaku Merapi yang disebut dengan kearifan lokal. Menurut Soetomo (2012, h.125) melalui pengalaman panjang masyarakat memiliki pengetahuan tentang bagaimana menghadapi dan menyikapi lingkungan baik fisik maupun sosial, termasuk adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Hal yang sama dikemukakan Mulyanto (2007), Manusia memahami diri dan lingkungannya melalui berbagai konsep dan jalinan yang diperoleh selama interaksi dengan lingkungannya tersebut, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kemampuan manusia merekam kesan dan gagasannya dari generasi ke generasi melalui lembaga sosialisasi menjadikan aspek budaya dalam melihat bencana begitu penting, kiranya sedikit sekali tindakan manusia yang tidak mendasarkan pada berbagai kesan dan gagasan yang terlembagakan. Akumulasi pengetahuan warga yang semakin hari semakin tinggi tentang bencana dengan segala resikonya, maka kemampuan warga dalam mengatasi hambatan yang terjadi juga akan semakin baik, karena pada dasarnya manusia selalu belajar dari pengalaman masa lalu (Mahedra, 2014).

Nilai spiritual, tradisi, dan budaya yang menyatu dalam kearifan lokal yang telah dikonstruksi turun-temurun selama ratusan tahun tentunya telah membentuk suatu ikatan yang sangat kuat antara masyarakat dengan alam dan membentuk karakter perilaku masyarakat untuk tetap bertahan hidup di sekitar Merapi. Tuntunan perilaku ini berkontribusi besar kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah dengan alam termasuk dalam penanggulangan bencana. Dalam konteks ini masyarakat lereng Merapi pada umumnya telah mempunyai cara untuk mengatasi masalah (*coping strategic*)

dalam penanggulangan bencana. Bencana yang telah berulang kali terjadi telah membangun masyarakat lereng Merapi mempunyai daya kemampuan pemulihan yang tinggi (*resilient*). Menurut Sulaksono dan Sugiharto (2013, h.99-100), menggunakan nilai kearifan lokal dalam tindakan penanggulangan bencana akan memperkuat kemandirian masyarakat terdampak. Kemandirian yang dilengkapi dengan kemampuan menghadapi bencana akan menjadikan masyarakat tersebut *resilient*.

Konteks kearifan lokal, masyarakat di lereng Merapi menghendaki adanya perilaku untuk hidup harmoni dengan alam. Konsep perilaku seperti apa yang boleh dilakukan oleh masyarakat dan apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dengan pendekatan spiritual. Meskipun kebijakan lokal tersebut tidak tertulis seperti hukum formal namun kearifan ini mempunyai daya ikat kuat untuk mengatur perilaku manusia. Secara khusus, Kearifan ini dikawal oleh tokoh spiritual telah terlegitimasi (baik di pemerintah maupun masyarakat) dan masyarakat sebagai pemilik kearifan tersebut.

Pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman merupakan informasi yang sangat berharga dalam penanggulangan bencana. Pengetahuan masyarakat (*local knowledge*) dan kearifan lokal baik dalam berinteraksi dengan alam, maupun sebagai alat deteksi dini bila akan terjadi bencana dan cara menghindarinya termasuk penentuan titik rawan dan titik aman untuk pengungsian telah diyakini mempunyai manfaat yang besar dan dikonstruksi dalam masyarakat secara turun temurun. Besarnya manfaat kearifan lokal dalam penanggulangan bencana ini juga dikemukakan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dalam Pembukaan Konferensi Tingkat Kementerian Asia-Pasifik tentang Pengurangan Risiko Bencana (AMCDRR) ke-5, Selasa tanggal 23 Oktober 2012 di Yogyakarta: “Komunitas lokal memiliki

beragam metode untuk menangani bencana. Metode mereka bisa lebih efektif lagi bila diintegrasikan dengan langkah-langkah terkini dan best practices pada manajemen bencana” (Kompas.com, 2012).

Masyarakat Cangkringan adalah masyarakat agraris yang masih menjaga nilai tolong menolong dan gotong royong dengan baik. Gotong royong ini tercermin dari aktivitas masyarakat dalam mengolah sawah, tanam padi dan panen yang hingga sekarang ini masih berjalan dengan baik. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga nilai yang sudah terbangun sejak ratusan tahun yang lalu.

Fenomena kuatnya kesadaran (*awareness*) dan gotong royong masyarakat Cangkringan dapat diamati dari pemeliharaan infrastruktur yang telah disiapkan. Sebagai ilustrasi masyarakat melakukan perbaikan jalan evakuasi yang rusak karena telah digunakan sebagai jalur truk penambang pasir. Kesadaran seperti ini juga dapat diamati dari gotong royong untuk memperbaiki MCK yang ada di barak pengungsian Pagerjuran dan gotong royong untuk membersihkan MCK di barak Pagerjuran.

Eksistensi gotong royong di masyarakat ini dapat dipandang sebagai modal sosial. Menurut Field (2010, h.230) Modal sosial bisa disebut dengan modal selama hal ini melahirkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan aktor – individu dan kelompok – untuk mencapai tujuan mereka secara lebih efektif dari pada mereka melakukan tanpanya. Sedangkan menurut Soetomo (2012, h.115) Sumber energi sosial dalam masyarakat berupa nilai kemandirian, solidaritas, kesadaran kolektif, tanggung jawab sosial yang mendorong terwujudnya tindakan bersama. Tidak dapat diingkari bahwa setiap orang sebagai individu mempunyai aspirasi, kepentingan yang dapat

berbeda dengan orang lain sesama warga masyarakat. Kunci terpeliharanya energi sosial adalah adanya komitmen bersama dan kesadaran akan tujuan bersama. Modal sosial dan energi sosial yang masih ada di masyarakat tentunya merupakan suatu kekuatan yang berpotensi besar dalam penanggulangan bencana.

Dari aspek Yuridis, pengetahuan dan pengalaman masyarakat serta kearifan lokal yang ada. Khususnya masyarakat lereng Merapi dalam berinteraksi dengan alam dapat ditelaah dari legitimasi kearifan lokal dalam beberapa ketentuan hukum. Ketentuan hukum dimaksud antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 30, bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Pasal 63 ayat 2 huruf t menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
2. Peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 53 ayat 3 Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal;
3. Peraturann Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 61 ayat 1) Pemerintah daerah mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan

inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Ayat 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

Legitimasi kearifan lokal dapat dikonotasikan bahwa perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan alam sekitar lereng Merapi tidak bertentangan dengan kewajiban masyarakat sebagaimana tertuang dalam hukum formal yakni: 1) UU No.24/2007 pasal 27; dan 2) Peraturan Gubernur DIY No.8/2010 pasal 19, Setiap orang berkewajiban: a) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b) melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan c) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Dinamika Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Bencana alam erupsi Merapi merupakan fenomena alam yang telah terjadi secara terjadi berulang. Pengalaman yang dapat dipetik dari setiap kali terjadi bencana, masyarakat merupakan aktor pertama dan utama selama proses penyelamatan dan sekaligus juga sebagai pihak yang paling beresiko. Masyarakat merupakan salah satu unsur utama untuk optimalisasi hasil dan keberlanjutan pengembangan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Menurut Komisi Brundland dalam Clark (1996), salah satu prasyarat utama terjadinya pembangunan berkelanjutan adalah menjamin efektifitas partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan, bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan, tetapi lebih bersifat menyeluruh mulai dari penentuan/perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatan hasil suatu kegiatan.

Manifestasi partisipasi menurut Koentjaraningrat(1984)mengemukakan, bahwa Partisipasi rakyat yang intensif disamakan dengan frekuensi tinggi turut sertanya rakyat pedesaan dalam aktivitas bersama. Partisipasi rakyat terutama rakyat pedesaan dalam pembangunan itu sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, yaitu; 1) Partisipasi dalam aktifitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus; 2) Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam (khususnya dalam pengurangan risiko bencana Erupsi Merapi Cangkringan) telah dijadikan sebagai komitmen bangsa. Kondisi ini tercermin dari berbagai program dan kegiatan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang masuk di Cangkringan. Program dan kegiatan dimaksud antara lain:

1. Kampung Siaga Bencana

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kampung Siaga Bencana (KSB), adalah suatu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat penanggulangan bencana. Di Cangkringan telah dibentuk KSB yang ditempatkan di desa Umbulharjo. Kampung siaga bencana Umbulharjo Cangkringan diresmikan oleh Menteri Sosial hari Rabu tanggal 12 Desember 2011. Diharapkan kampung siaga bencana yang terdiri dari elemen masyarakat ini mampu meminimalisir korban saat terjadi bencana alam (Harianjogja.com, 2011). Menurut Ketua KSB Umbulharjo: desa Umbulharjo adalah tempat jujukan (tujuan utama) masyarakat dalam proses penyelamatan. Sebagai tuan rumah kami harus mempunyai kesiapan untuk menjamu

mereka, yah.. minimal air minum. Kami bersyukur karena desa kami telah dijadikan sebagai KSB. Umbulharjo telah mempunyai Gardu sosial, dan Lumbung Sosial. Gardu sosial adalah bangunan permanen untuk operasionalisasi sektretariat KSB, dan Lumbung Sosial merupakan bangunan permanen sebagai tempat penyimpanan buffer stok dan persediaan barang barang kesiapsiagaan pennggulangan bencana. dalam kerangka optimalisasi kegiatan dalam penanggulangan bencana KSB didukung dengan pilar partisipan seperti: 1) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM); 2) Karang Taruna; 3) Organisasi Sosial (Orsos); 4) Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Pilar partisipan dimaksud berasal dari masyarakat setempat yang telah medapat mendapat pelatihan dan difasilitasi baik Kemensos maupun pemerintah daerah (Dinas Sosial).

2. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DTB)

Desa Kepuharjo dan desa Wukirsari telah ditunjuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman sebagai DTB. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Di Sleman telah ditunjuk tiga desa sebagai Desa Tangguh Bencana, yakni Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Desa Kepuharjo dan Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Desa Sindumartani. (Kusnadi, 2014)

3. Pemuda Siaga Peduli Bencana

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 406/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pembentukan Pemuda Siaga Peduli

Bencana (Dasipena). Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa Dasipena adalah suatu wadah komponen Pemuda yang dibentuk untuk mendukung upaya kesehatan dalam penanggulangan bencana di setiap daerah. Sistem pengorganisasian dari Dasipena dilakukan secara berjenjang dari pusat, provinsi sampai di kabupaten. Masyarakat yang dilibatkan sebagai anggota adalah wakil organisasi kepemudaan yang telah dilatih.

4. Sekolah Siaga Bencana

Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana secara menyeluruh, di Cangkringan telah didukung dengan Sekolah Siaga Bencana. Berdasar Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70a/MPN/SE/2010 hal Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah kepada Kepala Daerah, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maupun dinas-dinas terkait Pemerintah Kabupaten Sleman telah menunjuk dua sekolah yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Cangkringan dan SMP Negeri 2 Cangkringan sebagai Sekolah Siaga Bencana. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan SMK Muhammadiyah Cangkringan antara lain sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB), Pelatihan dan penyusunan kurikulum PRB terintegrasi kedalam kurikulum sekolah. Pelatihan bagi guru dan siswa dalam hal Palang Merah Indonesia (PMI), *Search and Rescue* (SAR), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK), Dapur Umum, dan Komunikasi. Penyusunan rencana dokumen kontijensi bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi dan gladi/simulasi bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi (Dishubkominformo DIY, 2014).

Beberapa program yang masuk di Cangkringan menunjukkan bahwa sasaran dari peningkatan kapasitas dan kapabilitas

yang komprehensif, mulai dari kelompok anak dan dewasa. Disamping itu, informasi ini dapat diinterpretasikan bahwa di kecamatan Cangkringan telah terbentuk partisipan baik secara individu maupun kelembagaan yang diinisiasi atau dibentuk, dibina, difasilitasi oleh pemerintah untuk dapat dijadikan sebagai partner dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masing masing lembaga memberikan informasi dan transformasi baik dari segi keterampilan teknis PPPK, pemasangan tenda, penyelenggaraan dapur umum, komunikasi, pemetaan maupun manajemen yang didukung dengan fasilitas peralatan dan bahan yang diperlukan.

Dalam kondisi normal pasca erupsi, Merapi telah dijadikan sebagai salah satu objek Wisata. Memenuhi kebutuhan pelayanan wisata argo atau lebih dikenal dengan Wisata Lava (*Lava Tour*), telah berkembang komunitas pemandu wisata. Komunitas dimaksud antara lain: komunitas Jeep dan komunitas Motor trail misalnya Gadung Melati Trail Club. Anggota komunitas tersebut umumnya sudah mengenal seluruh lokasi seputar Merapi dengan baik. Di satu sisi, mereka adalah pemandu Wisata, di sisi lain mereka berperan sebagai penyuluh tentang seluk beluk kondisi Merapi. Komunitas pemandu wisata ini juga merupakan salah satu jaringan yang dimiliki oleh masyarakat lereng Merapi, khususnya yang berkecimpung dalam pengembangan kesiapsiagaan masyarakat. Sebagai ilustrasi salah satu anggota komunitas trail Gadung Melati Trail Club yang tinggal di hunian tetap Karang Kendal mengungkapkan selama kondisi normal mereka akan bekerja di Merapi, tetapi dalam kondisi penanggulangan bencana mereka akan menjalankan tugasnya sebagai personil KSB Umbulharjo.

Masyarakat Cangkringan memang telah mempunyai informasi dan pengalaman yang cukup banyak terutama untuk penyelamatan diri secara individual, namun untuk penyelamatan

kolektif perlu kesiapan yang lebih matang. Dalam kerangka kesiapsiagaan masyarakat, di Cangkringan telah disiapkan 1) Peta tentang kondisi kerawanan Lereng Merapi, jalur evakuasi, penentuan lokasi penampungan pengungsi; 2) sosialisasi informasi tentang kebencanaan dan penanggulangannya bagi masyarakat; 3) tenaga terampil yang didukung dengan peralatan dan fasilitas untuk penanggulangan bencana serta akses ke lembaga pemerintah; dan 4) peralatan (alat yang digunakan, cara penggunaan, dan tempat penyimpanan serta kapan boleh digunakan). Persoalannya adalah bagaimana implementasi koordinasi dalam manajemen penanggulangan bencana. Sebab tanpa koordinasi yang baik, maka hasil yang dicapai (pengurangan resiko bencana) tidak akan optimal.

Pengalaman yang dipetik dari setiap kali terjadi bencana, koordinasi dalam penyelamatan, tanggap darurat masih sulit dilaksanakan, terlebih lagi selama proses penyelamatan masyarakat umumnya mengalami kepanikan. Dalam kerangka koordinasi tersebut diperlukan keterampilan seluruh unsur masyarakat. Oleh karena itu untuk membangun keterampilan masyarakat dalam koordinasi dimaksud simulasi penanggulangan bencana menjadi semakin penting. Analog dengan implementasi peraturan penerbangan internasional, seseorang pramugari akan selalu memberikan informasi tentang keselamatan dalam penerbangan kepada seluruh penumpang, jika seseorang naik pesawat terbang 1000 kali maka ia akan memperoleh informasi yang sama sebanyak 1000 kali. Interpretasinya adalah semakin banyak simulasi penanggulangan bencana yang diselenggarakan, maka masyarakat akan semakin siap. Masyarakat dengan “kemampuan” (pengetahuan *Local*, teknologi *Local*, kelembagaan lokal) yang mereka miliki akan dengan mudah memahami, dan menerima produk produk perencanaan dan perancangannya apabila “bahasa” yang

digunakan bisa mereka mengerti. Masyarakat lokal umumnya memiliki pengetahuan lokal dan kearifan ekologi dalam memprediksi dan melakukan mitigasi bencana alam di daerahnya. Pengetahuan lokal tersebut biasanya diperoleh dari pengalaman empiris yang kaya akibat berinteraksi dengan ekosistemnya (Respati Wikantiyoso, 2011).

Pasca erupsi Merapi, simulasi yang diselenggarakan di Cangkringan cukup banyak. Lembaga yang pernah menyelenggarakan simulasi di Cangkringan antara lain: 1) Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM tanggal 13 Desember 2013; 2) Forum Penanggulangan Bencana Desa (FPBDes) Argomulyo, Cangkringan, Sleman bulan Maret 2014, h.3) Korem 072/PMK September 2013; dan 4) Sekolah Siaga Bencana.

Simulasi paling akhir diselenggarakan pada hari Minggu 16 Maret 2014 dari jam 08.00 WIB -11.00 WIB bertempat di Lapangan Kridomulyo Jetis Argomulyo Cangkringan, telah dilaksanakan kegiatan simulasi Desa tangguh bencana desa Argomulyo Cangkringan. Acara tersebut dihadiri dari BPBD kabupaten Sleman, PKPU Cabang DIY, Muspika Kecamatan Cangkringan dan Ketua Rapi Kabupaten Sleman, dan ikuti sekitar 600 peserta dari berbagai komunitas relawan Cangkringan yang tergabung dalam Komunitas SKSB, AMC, KSM. SARWUKIR serta warga masyarakat Dusun Jetis Argomulyo Cangkringan. Kegiatan tersebut disimulasikan, bagaimana persiapan menghadapi bencana, mengungsikan penduduk dititik aman ,mengevakuasi korban manusia, ternak dan harta benda serta bagaimana penanganan pengungsi pendirian dapur umum sampai pada pendataan kerugian baik korban manusia dan harta benda. Simulasi ini terselenggara karena kerjasama pemerintah Desa Argomulyo dengan BPBD dan PKPU cabang DIY, dengan tujuan agar masyarakat desa Argomulyo mengerti apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana alam erupsi

Merapi (Polressleman.org, 2014).

Beberapa Informasi di atas mengindikasikan bahwa di Cangkringan telah banyak dijumpai tenaga terlatih yang dapat berfungsi untuk optimalisasi penanggulangan bencana. Di satu sisi, mereka adalah orang yang sudah banyak mempunyai informasi, keterampilan dan pengalaman. Di sisi lain mereka adalah orang yang sudah dilatih dengan keterampilan dari lembaga yang mempunyai komitmen dalam penanggulangan bencana. Masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana sudah didukung dengan sarana komunikasi.

Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana juga dapat diamati dari respon masyarakat dalam menghadapi kenaikan status Gunung Merapi dari aktif normal ke waspada. Rabu dini hari warga di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai bergotong royong mempersiapkan barak pengungsian. Menurut Heri Suprpto Kepala Desa Kepuharjo “Setelah ada pengumuman kenaikan status Gunung Merapi dari BPPTKG Yogyakarta, kami langsung memeriksa kesiapan barak pengungsian. Selain itu peralatan untuk dapur umum juga mulai kami persiapkan”. Kesiapan masyarakat tersebut juga didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Menurut Julisetiono, “Kami sudah menyiapkan 35 tempat pengungsian, mulai dari kantor pemerintah, hingga barak. Semuanya dibagi dalam lima sektor, berdasarkan batasan wilayah sungai,” (Antaraneews.com, 2014).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat lereng Merapi merupakan masyarakat yang koordinatif. Menurut Soetomo (2006, h.388), dalam kehidupan masyarakat pada tingkat komunitas lebih mudah diorganisasikan berbagai bentuk tindakan bersama, termasuk tindakan bersama untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat secara individual apalagi kebutuhan kolektif. Hal itu disebabkan karena pada tingkat komunitas masih lebih kental

dirasakan adanya kesadaran kolektif, solidaritas sosial dan kepentingan bersama. Dengan demikian, apabila masyarakat lokal memiliki komitmen tentang suatu gagasan sebagai bentuk prakarsa dan kreativitas dari dalam, mereka akan berusaha untuk memobilisasi sumber daya yang ada melalui tindakan bersama guna merealisasikan gagasan tersebut.

Meskipun masyarakat lereng Merapi adalah masyarakat yang masih kental dengan sosio-magis, namun masyarakat di Cangkringan sangat adaptif dengan perkembangan ilmu dan teknologi bahkan untuk bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat luas. Masyarakat terbuka untuk menerima perubahan yang terjadi dan koordinatif dengan masyarakat luas, bahkan upaya yang dirintis untuk penanggulangan bencana alam telah berkembang sangat pesat. Menurut Soetomo (2012, h.141). Umumnya masyarakat mempunyai kemampuan adaptif, dengan demikian dalam melaksanakan gotong royong pun selalu disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Salah satu bentuk perubahan dalam kehidupan masyarakat adalah perubahan dari kondisi kehidupan yang homogen menjadi heterogen. Perubahan ini membawa dampak pada bentuk integrasi sosialnya dari integrasi struktural ke fungsional.

Aktualisasi Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Bencana alam dan dampak yang ditimbulkan merupakan permasalahan yang kompleks. Dampak buruk yang ditimbulkan tidak hanya sebatas pada permasalahan sosial bagi individu, keluarga dan lingkungannya, tetapi telah meluas pada sendi sendi sosial, politik, ekonomi dan keamanan bangsa. Dari kerangka berpikir ini, kesiapsiagaan masyarakat masyarakat Cangkringan Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, tidak hanya sekedar untuk menekan risiko bencana bagi masyarakat di sekitar Lereng Merapi, namun upaya yang ditempuh oleh masyarakat Cangkringan ini

dapat berimplikasi lebih luas.

Bagi Pemerintah Republik Indonesia, jika kesiapsiagaan masyarakat ini diprediksi mampu mengurangi resiko bencana sebesar 30 persen maka akan terjadi penurunan permasalahan sosial ikutan misalnya: trauma, kemiskinan. Implikasi adalah berkurangnya pengeluaran anggaran pemerintah untuk menangani permasalahan dimaksud. Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang dialokasikan untuk pemulihan sosial korban bencana dan dampaknya baik melalui BNPB dan BPBD maupun instansi sektoral dapat dialokasikan untuk program lain yang lebih mendesak bagi kepentingan bangsa.

Arti yang lebih luas, Kesiapsiagaan masyarakat Cangkringan dalam PBA dapat dipandang sebagai sebuah refleksi dari kesepakatan bangsa di dunia dalam pengurangan risiko bencana. Upaya negara di dunia ini tercermin dari: 1) Deklarasi Hyogo – Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action/HFA*), tahun 2005 – 2015 sebagai Dekade Membangun Ketahanan Bangsa dan Masyarakat terhadap Bencana. KAH/HFA yang telah dirumuskan di Kobe, Jepang pada *World Conference on Disaster Reduction* pada Januari 2005; 2) ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response di Vientiane, Laos PDR, pada tanggal 26 Juli 2005. Persetujuan ASEAN ini telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response.

Dari segi politis, aksi masyarakat Cangkringan ini merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari pertanggung-jawaban Pemerintah Republik Indonesia atas KAH/HFA yang akan berakhir pada tahun 2015, dan kesepakatan negara negara ASEAN. Kondisi ini menunjukkan tingginya komitmen bangsa Indonesia terhadap berbagai aspek *Disaster Risk Reduction*. Komitmen bangsa Indonesia

dalam penanggulangan bencana ini juga ditunjukkan dengan keseriusan bangsa dalam penyelenggaraan Asian Ministerial *Conference on Disaster Risk Reduction* (AMCDRR) ke-5 yang dilaksanakan Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 22 – 25 Oktober 2012. Tema konferensi “Memperkuat Kapasitas Lokal dalam Pengurangan Risiko Bencana (*Strengthening Local Capacity on Disaster Risk Reduction*)” (Kompas.com, 2012).

Konferensi AMCDRR ke-5 tahun 2012 ini telah menghasilkan Deklarasi Yogyakarta sebagai kesepakatan tingkat Regional Asia-Pasifik. Deklarasi Yogyakarta tersebut merupakan dokumen penting dalam pengurangan risiko bencana (PRB). Isu penting yang ikut dijadikan bahasan dalam Konferensi AMCDRR strategi setelah berakhirnya *Hyogo Framework of Action* pada 2015, sebuah komitmen internasional dalam penanganan bencana

Deklarasi Yogyakarta yang disepakati bulan Oktober 2012 merupakan salah satu bentuk pengakuan masyarakat internasional terhadap komitmen dan upaya Indonesia. Pengakuan masyarakat internasional terhadap bangsa Indonesia dalam pengurangan resiko bencana juga ditunjukkan dengan tropi *Global Champion of Disaster Risk Reduction* (GCDRR) *International Strategy for Disaster Reduction* (ISDR) di Bali 2011. GCDRR diserahkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon kepada Sekretaris Jenderal PBB Susilo Bambang Yudhoro. Sebagai kepala negara pertama yang menerima gelar *Global Champion of Disaster Risk Reduction*.

KESIMPULAN

Optimalisasi hasil dari sebuah pengembangan kesiapsiagaan masyarakat pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan atas ide/gagasan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk program, pelaksanaan, dan pemanfaatan, serta pemeliharaan hasil yang

dicapai. Kondisi masyarakat yang adaptif, solid, mudah diorganisasi dan masih menjunjung tinggi nilai tolong menolong dan gotong royong merupakan suatu kekuatan (energi sosial).

Aksi masyarakat dalam pengembangan kesiapsiagaan masyarakat menunjukkan, bahwa pengurangan risiko bencana telah menjadi tanggung-jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai arus dari bawah (*bottom up*) dan Kebijakan pemerintah (*top down*) telah menyatu dalam satu langkah untuk mencapai kemaslahatan manusia. Penghargaan dan pemberian ruang terhadap kearifan lokal untuk bersinergi dalam penentuan kebijakan penanggulangan bencana. Kondisi ini tentunya akan memotivasi tumbuhnya ekspresi, inovasi, dan tanggung jawab masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kondisi ini berimplikasi luas, baik bagi masyarakat Yogyakarta sendiri, negara, dan kepentingan internasional, maupun dalam pengembangan model penanganan masalah krusial yang berkaitan dengan bencana.

Aksi yang selama ini telah digelar di Cangkringan merupakan salah satu bukti keseriusan negara dalam pengurangan risiko bencana. Dalam perspektif hubungan internasional, aksi dimaksud menunjukkan konsistensi dan pertanggungjawaban Negara Republik Indonesia atas kesepakatan ASEAN, Asian dan bangsa bangsa dunia dalam pengurangan resiko benana.

Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan proses yang dinamis. Kegiatan yang diselenggarakan tidak hanya berhenti pada target tertentu kemudian berhenti atau diam tetapi harus selalu dijaga kontinuitasnya. Dalam kondisi normal, ada kemungkinan bahwa masyarakat mengalami kejenuhan ketika harus mengikuti tingginya frekuensi pertemuan, penyuluhan, dan simulasi yang digelar di lingkungannya. Kondisi ini tentunya dapat berdampak pada menurunnya kualitas kesiapsiagaan. Meskipun

kejenuhan masyarakat ini belum terlihat, namun hal ini perlu dijadikan sebagai pertimbangan untuk peningkatan kesadaran masyarakat.

Disadari bahwa masyarakat yang tinggal di setiap wilayah rawan bencana khususnya di wilayah lereng gunung berapi. Umumnya telah mempunyai metode pemecahan masalah (*coping strategic*) dan nilai yang mendasari perilaku masyarakat dalam berhubungan dengan alam. Oleh karena itu, penerapan model pengembangan kesiapsiagaan dapat direplikasi di lokasi daerah lain yang mempunyai tingkat kerawanan cukup tinggi. Namun dalam kerangka replikasi model tersebut, alokasi waktu dan tenaga dari masyarakat perlu dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Artinya, sebagian besar masyarakat yang tinggal di lereng gunung tidak berpenghasilan tetap seperti pegawai formal, sehingga waktu dan tenaga yang seharusnya produktif untuk diri dan keluarganya tersita untuk mengikuti berbagai program yang masuk di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Field, John. (2010). *Modal Sosial*. Kasihan Bantul: Kreasi Wacana.
- Gunawan, Sugiyanto, dan Amalia D.A. (2009). *Studi Evaluatif Tentang Penanggulangan Bencana Alam: Peran Tagana Dalam Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Untuk Mengurangi Risiko Bencana Alam*. Jakarta: P3KS Press.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerinah Lokal*, Yogyakarta: Gaya Media.
- Marendra, G. (2014). *Kapasitas Kelembagaan dan Kearifan Lokal Dalam Antisipasi Penanggulangan Bencana Merapi Tahun 2010 di Kabupaten Klaten, (Studi Kasus di Desa Bale Rante Kecamatan Kemalang)*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Tahun 2014*.
- Soetomo. (2006). *Strategi strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (2012). *Keswadayaan Masyarakat, Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulaksono, Arwin dan Sugiharto R. (2013). *Indonesia Bangkit: Transformasi Masyarakat Rentan Menuju Tangguh Bencana Dengan Dukungan Program Humanitarian*. Jakarta: Grasindo.
- Wikantiyoso, Respati. (2011). *Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota? (Potensi Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan Kota untuk Upaya Mitigasi Bencana), Lokal Wisdom, Volume:II, Nomor: 1. Halaman: 18 - 29, Januari 2010*
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulan Bencana Alam
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 406/Menkes/SK/IV/2008 Tentang Pembentukan Pemuda Siaga Peduli Bencana (DASIPENA)
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15 tahun 2011 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami
- Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No. 70a/MPN/SE/2010 hal Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana Di Sekolah
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana.
- Internet:**
- Polressleman.org. (2014). *Komunitas Relawan dan Warga Cangkringan Gelar Simulasi Desa Tangguh Bencana*. Maret 20, 2014. <http://polressleman.org/komunitas-relawan-dan-warga-cangkringan-gelar-simulasi-desa-tangguh-bencana/>
- Polressleman.org. (2014). *Komunitas Relawan dan Warga Cangkringan Gelar Simulasi Desa Tangguh Bencana*. Maret 20, 2014. <http://polressleman.org/komunitas-relawan-dan-warga-cangkringan-gelar-simulasi-desa-tangguh-bencana/>
- Antaranews. (2014). *Warga lereng Merapi gotong royong siapkan barak pengungsian*. April 30, 2014. <http://www.antaranews.com/berita/431931/warga-lereng-merapi-gotong-royong-siapkan-barak-pengungsian>
- Antaranews. (2010). *Erupsi Merapi Rusak 867 Hektare Hutan*. November 9, 2010. <http://antaranews.com/berita/232579/erupsi-merapi>
- Jogjapro. (2013). *SMK Muhammadiyah Cangkringan Menjadi Sekolah Siaga Bencana*. Maret 12, 2013. http://plazainformasi.jogjapro.go.id/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=1686:smk-muhammadiyah-cangkringan-menjadi-sekolah-siaga-bencana&catid=34:berita-baru&Itemid=53
- Harianjogja. (2011). *Kampung siaga bencana Umbulharjo diresmikan*. Januari 12, 2011. <http://www.harianjogja.com/baca/2011/01/12/kampung-siaga-bencana-umbulharjo-diresmikan-144261>.
- Hendiatno, Agus. (2007). *Gunung Merapi: Kearifan Lokal dalam Manajemen Bencana Alam dan Pengelolaan Lingkungan*. Mei 25, 2014. <http://hidupbersamabencana.wordpress.com/2007/06/04/gunung-merapi-kearifan-lokal-dalam-manajemen-bencana-alam-dan-pengelolaan-lingkungan/> 25 Mei 2014.
- Kusnadi. (2014). *Tiga Desa ditunjuk sebagai Desa Tangguh Bencana*. (Mei 18, 2014). Infopublik.org/rear/78280/tigadesaditunjuk-sebagai-desa-tangguh-bencana.
- Solopos. (2012). *Merapi Waspada Jalur Evakuasi Merapi di Cangkringan Rusak Parah*. September 30, 2012. <http://www.solopos.com/2014/05/01/merapi-waspada-jalur-evakuasi-merapi-di-cangkringan-rusak-parah-505434>